

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Mekanisme Tata Kelola

Mekanisme Tata kelola perusahaan adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Secara prinsip, *corporate governance* dalam arti sempit meliputi dua aspek, yaitu aspek *governance structure* atau *board structure* dan aspek *governance process* atau *governance mechanism*.

Monks (2003) mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang dapat menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholder*. Sedangkan menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)*, *Corporate governance* adalah proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya.

IICG (*Indonesian Institute for Corporate Governance*) mendefinisikan *corporate governance* sebagai serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional

perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Sementara itu *Cadbury Committee* dari Inggris seperti yang dikutip oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) mendefinisikan mekanisme corporate governance sebagai seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka, atau sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Di samping itu *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) juga menjelaskan, bahwa tujuan dari *Corporate Governance* adalah “untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)”.

*International Chamber of Commerce* yang dikutip oleh Susilo dan Simarmata (2007) memberikan definisi bahwa, “*corporate governance* adalah suatu tata hubungan di antara manajemen perseroan, direksi, pemodal, masyarakat dan institusi lain yang ikut menginvestasikan uangnya pada perseroan serta mengharapkan imbalan atas investasinya tersebut. *Corporate Governace* juga harus memastikan bahwa direksi bertanggung jawab dan akuntabel terhadap pencapaian sasaran perseroan serta memastikan bahwa perseroan dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menurut OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*), *corporate governance* merupakan suatu sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Terdapat beberapa prinsip dalam implementasi *good corporate governance (GCG)*. Menurut pedoman umum *good corporate governance* Indonesia, terdapat lima prinsip utama yang terkandung dalam *good corporate governance* yaitu *transparency, accountability, responsibility, independency* serta *fairness*. Mekanisme Tata Kelola perusahaan dalam penelitian ini dilihat dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan dewan direksi.

#### Struktur Kepemilikan

Menurut Jensen dan Meckling (1976) kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua mekanisme *corporate governance* utama yang membantu mengendalikan masalah keagenan (*agency conflict*).

##### 1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh investor institusional. Semakin besar kepemilikan institusional pada perusahaan, maka semakin rendah kecenderungan manajer melakukan aktivitas manajemen laba karena adanya fungsi pengawasan yang lebih baik dari investor yang *shopiscated* (Wedari, 2004). Balsam dkk (2002) menemukan adanya hubungan negatif antara akrual diskresioner yang tidak diekspektasi dengan imbal hasil saham di

sekitar tanggal pengumuman, di mana hubungan negatif tersebut bervariasi tergantung tingkat kecanggihan investor, di mana reaksi pasar dari investor yang lebih canggih memendahului investor yang tidak canggih. Mitra (2002), Koh (2003), dan Midiastuty & Machfoedz (2003) juga menemukan bahwa kehadiran kepemilikan institusional yang tinggi membatasi manajer untuk melakukan pengelolaan laba. Jika pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan bersifat oportunistik maka kepemilikan institusional yang tinggi akan mengurangi pengelolaan laba.

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi manajemen laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen (Boediono, 2005). Menurut Bushee (1998) kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intens. Kepemilikan institusional dapat menekan kecenderungan manajemen untuk memanfaatkan discretionary dalam laporan keuangan sehingga memberikan kualitas laba yang dilaporkan. Pemikiran ini didukung oleh penelitian Rajgepal dan Venkatchlam (1998) dan Pratama dkk (2003) dalam Boediono (2005). Hasil penelitian mereka menyimpulkan bahwa

kepemilikan institusional di perusahaan dapat mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan. Dengan tingginya kepemilikan manajerial, para investor institusional akan mendapatkan kesempatan control perusahaan yang lebih sedikit. Ini berarti bahwa hubungan antara kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah negatif.

Tingginya risiko yang dihadapi perusahaan meningkatkan risiko kebangkrutan dan volatilitas dari pendapatan, hal ini akan mengurangi minat institusi untuk melakukan investasi pada saham perusahaan itu karena institusi lebih mementingkan pada stabilitas pendapatan. Menurut Crutchley et.al (1999) dalam Nasir (2006) pengaruh kebijakan hutang terhadap kepemilikan institusional adalah positif. Kebijakan yang tinggi menyebabkan perusahaan dimonitor oleh pihak debtholders. Karena monitoring dalam perusahaan yang ketat tadi menyebabkan manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan debtholders dan shareholders, sehingga kondisi ini akan menarik masuknya kepemilikan institusional.

## 2. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan persentase saham yang dimiliki oleh pihak manajemen. Pihak manajemen adalah pengelola perusahaan, seperti direktur, manajer, dan karyawan (Boediono, 2005). Manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai

pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Hal ini sesuai dengan system pengelolaan perusahaan dalam dua kriteria, yaitu: 1) Perusahaan yang dipimpin oleh seorang manajer dan pemilik (owner manager); 2) Perusahaan yang dipimpin oleh manajer dan non pemilik (non owners manager). Dua kriteria ini akan mempengaruhi manajemen laba, sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan. Secara umum dapat dikatakan bahwa persentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba. Beberapa penelitian mendukung bahwa manipulasi terhadap earning juga sering dilakukan oleh manajemen.

Penyusunan earnings dilakukan oleh manajemen yang lebih mengetahui kondisi di dalam perusahaan, kondisi tersebut diprediksi oleh Dechow (1995) dalam Ujianto dan Pramuka (2007) dapat menimbulkan masalah karena manajemen sebagai pihak yang memberikan informasi tentang kinerja perusahaan dievaluasi dan dihargai berdasarkan laporan yang dibuatnya sendiri. Laba yang kurang berkualitas bisa terjadi karena dalam menjalankan bisnis perusahaan, manajemen bukan merupakan pemilik perusahaan. Pemisahan kepemilikan ini akan dapat menimbulkan konflik dalam pengendalian dan pelaksanaan pengelolaan perusahaan yang menyebabkan para manajer bertindak tidak sesuai dengan keinginan para pemilik. Konflik yang terjadi akibat pemisahan kepemilikan ini

disebut dengan konflik keagenan. Beberapa mekanisme yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah keagenan tersebut adalah dengan meningkatkan kepemilikan manajerial (Jensen dan Meckling, 1976). Dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajer, diharapkan manajer akan bertindak sesuai dengan keinginan para principal karena manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa untuk meminimalkan konflik keagenan adalah dengan meningkatkan kepemilikan manajerial di dalam perusahaan. Ross et al (1999) menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan manajemen dalam perusahaan maka manajemen akan cenderung untuk berusaha meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan pemegang saham dan untuk kepentingan sendiri. Shleifer dan Vishny (1986) dalam Ujiantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa kepemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki insentif untuk memonitor. Sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah juga sekaligus sebagai seorang pemilik. Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang juga termasuk dirinya. Hal ini mengindikasikan pentingnya kepemilikan manajerial dalam struktur kepemilikan perusahaan (Suprayuga, 2006).

### 3. Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan seseorang yang ditunjuk untuk memimpin Perseroan Terbatas (PT), dapat berasal dari seseorang yang memiliki perusahaan tersebut ataupun orang profesional yang ditunjuk oleh pemilik usaha. Dewan direksi bertindak sebagai aspek sistem pengendalian dalam suatu perusahaan, memiliki peran ganda yaitu sebagai monitoring dan pengambil keputusan (Famadan Jensen, dalam Dilling, 2009).

Dewan Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara penuh dalam mengelola perusahaan. Semakin tinggi frekuensi rapat antara anggota dewan direksi, mengindikasikan semakin seringnya komunikasi dan koordinasi antar anggota sehingga lebih mempermudah untuk mewujudkan good corporate governance (Suryono dan Prastiwi, 2011:11).

Dewan perlu memiliki akuntabilitas terhadap perusahaan dan pemegang saham serta bertindak yang terbaik untuk kepentingan mereka. Dewan juga diharapkan bertindak secara adil kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya, seperti kepada karyawan, kreditur, pelanggan, pemasok dan masyarakat sekitar perusahaan.

Dewan Direksi perlu menerapkan prinsip mekanisme tata kelola perusahaan, secara umum terdiri dari lima prinsip. Kelima prinsip tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Transparency

Perusahaan harus menyediakan informasi yang akurat, jumlahnya cukup, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan tersebut. Segala informasi baik informasi keuangan maupun non-keuangan yang sifatnya material wajib dilaporkan secara akurat dan tepat waktu. Dengan menggunakan informasi tersebut, shareholders dapat mengetahui resiko dari setiap transaksi dengan perusahaan, sehingga sebagai akibatnya efisiensi pasar juga akan terbentuk. Konflik kepentingan antara pihak-pihak perusahaan juga dapat diminimalisasi dengan mekanisme tata kelola perusahaan.

2. Accountability

Keterbukaan dalam informasi keuangan perusahaan adalah salah satu hal yang harus di kendalikan oleh perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan pemisahan fungsi pelaksana dan pengawas, dimana fungsi pelaksanaan dijalankan oleh direksi, dan fungsi pengawas dijalankan oleh komisaris. Oleh karena itu, komisaris independen sangat diperlukan di setiap perusahaan. Mekanisme, peran, dan tanggung jawab jajaran manajemen yang profesional diperlukan agar setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat sesuai dengan tujuan perusahaan.

### 3. Responsibility

Perusahaan harus bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaannya dengan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai prinsip korporasi yang sehat. Kerja sama yang aktif antara perusahaan dan para pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

### 4. Fairness

Prinsip ini berupa perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholders (baik pemegang saham minoritas, pemegang saham asing, maupun lainnya) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga terhindar dari berbagai bentuk kecurangan. Kecurangan ini dapat berupa insider trading, KKN, atau keputusan-keputusan yang dapat merugikan pemegang saham. Agar prinsip fairness ini dapat terwujud, maka harus diberlakukan peraturan perundangan yang jelas, tegas, konsisten, dan dapat diterapkan secara efektif. Peraturan perundangan seperti ini diperlukan agar terhindar dari penyalahgunaan lembaga peradilan (litigation abuse).

### 5. Independency

Perusahaan harus dikelola secara profesional tanpa adanya konflik kepentingan atau pengaruh dari pihak manapun, terutama pemegang saham mayoritas, yang bertentangan

dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan peraturan prinsip korporasi yang sehat. Berdasarkan prinsip-prinsip mekanisme tata kelola perusahaan yang telah dijelaskan diatas, yang paling relevan dengan penelitian ini adalah prinsip accountability.

Prinsip accountability ini menuntut dewan direksi dan dewan komisaris sebagai fungsi pelaksana dan pengawas agar mengerti hak dan kewajibannya masing-masing. Pelaksanaan *corporate governance* dapat mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh manajer dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri dan umumnya *corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor.

## 2.2 Prediksi Kebangkrutan

Brigham dan Gapenski dalam Fachrudin (2008:2-3) mengatakan kebangkrutan dapat diartikan dalam beberapa cara tergantung masalah yang dihadapi oleh perusahaan:

- a. Kegagalan Ekonomi (*Economic Failure*) Kegagalan ekonomi mengindikasikan bahwa pendapatan perusahaan tidak mampu menutupi biaya totalnya, termasuk biaya modal.
- b. Kegagalan Usaha (*Business Failure*) Istilah *business failure* digunakan untuk mengelompokkan kegiatan bisnis yang telah

menghentikan operasinya kemudian berakibat kerugian bagi para kreditur.

c. Insolvensi Teknis (*Technical Insolvency*) Perusahaan dianggap mengalami insolvensi teknis jika tidak mampu membayar kewajiban jangka pendek pada saat jatuh tempo. Insolvensi teknis mengindikasikan tingkat likuiditas yang sangat rendah dan mungkin hanya bersifat sementara. Insolvensi dalam Pengertian Kebangkrutan (*Insolvency in Bankruptcy*).

Analisis kebangkrutan dilakukan untuk memperoleh peringatan awal kebangkrutan tersebut (tanda-tanda awal kebangkrutan). Semakin awal tanda-tanda kebangkrutan tersebut, semakin baik bagi pihak manajemen karena pihak manajemen bisa melakukan perbaikan-perbaikan (Hanafi dan Halim, 2009:263). Probabilitas kebangkrutan (*Probability of Default*) adalah probabilitas dimana aset perusahaan menjadi kurang dari nilai barrier tertentu.

Altman (1968) menemukan suatu formula untuk mendeteksi kebangkrutan perusahaan yaitu Z-score. Z-Score adalah skor yang ditentukan dari hitungan standar dikalikan rasio-rasio keuangan yang akan menunjukkan tingkat kemungkinan kebangkrutan perusahaan.

Menurut Muslich (2007: 59-60), sejumlah studi telah dilakukan untuk mengetahui kegunaan analisis rasio keuangan dalam

memprediksi kegagalan perusahaan. Salah satu studi tentang prediksi ini adalah Multiple Discriminant Analysis yang dilakukan oleh Edward I. Altman. Altman mempergunakan lima jenis rasio, yaitu Working Capital to Total Assets, Retained Earning to Total Assets, Earning Before Interest and Taxes to Total Assets, Market Value of Equity to Book Value of Total Debt dan Sales to Total Assets. Secara matematis persamaan Altman Z-Score tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: (Toto Prihadi 2010:336)

$$Z = 1,2X_1 + 1,4X_2 + 3,3X_3 + 0,6X_4 + 1,0X_5$$

Dimana:

X1: Working Capital to Total Asset (Modal kerja dibagi total aktiva)

X2: Retained Earnings to Total Assets (Laba ditahan dibagi total aktiva)

X3: Earnings Before Interest and Taxes to Total Assets (Laba sebelum pajak dan bunga dibagi total aktiva)

X4: Market Value of Equity to Book Value of debt (Nilai pasar modal dibagi dengan nilai buku hutang)

X5: Sales to Total Assets (Penjualan dibagi total aktiva)

Hasil perhitungan nilai Z-Score bisa dijelaskan dengan table sebagai berikut:

Tabel 2.1

## Interprestasi Nilai Z-score

Nilai Z-Score	Interpretasi
$Z > 2.99$	Perusahaan tidak mengalami masalah dengan kondisi keuangan.
$2.7 < Z < 2.99$	Perusahaan mempunyai sedikit masalah keuangan (meskipun tidak serius).
$1.88 < Z < 2.69$	Perusahaan akan mengalami permasalahan keuangan jika tidak melakukan perbaikan yang berarti dalam manajemen maupun struktur keuangan.
$Z < 1.88$	Perusahaan mengalami masalah keuangan yang serius.

Sumber : Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan, Darsono (2005: 105)

Uraian dari rasio keuangan yang terdapat dalam persamaan model Altman ZScore diatas adalah: (M.Adnan dan M.Taufiq, 2005:190)

1. Working Capital to Total Asset Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan modal kerja bersih dari keseluruhan total aktiva yang dimilikinya. Rasio ini dihitung dengan membagi modal kerja bersih dengan total aktiva. Modal kerja bersih diperoleh dengan cara aktiva lancar dikurangi dengan kewajiban lancar. Modal kerja bersih yang negative kemungkinan besar akan menghadapi masalah dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya karena tidak tersedianya aktiva lancar yang cukup untuk menutupi kewajiban

tersebut, sebaliknya, perusahaan dengan modal kerja bersih yang bernilai positif jarang sekali menghadapi kesulitan dalam melunasi kewajibannya.

2. Retained Earning to Total Asset Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba ditahan dari total aktiva perusahaan. Laba ditahan merupakan laba yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham. Dengan kata lain, laba ditahan menunjukkan berapa banyak pendapatan perusahaan yang tidak dibayarkan dalam bentuk dividen kepada para pemegang saham. Laba ditahan menunjukkan klaim terhadap aktiva, bukan aktiva per ekuitas pemegang saham. Laba ditahan terjadi karena para pemegang saham biasa mengizinkan perusahaan untuk menginvestasikan kembali laba yang tidak didistribusikan sebagai dividen. Dengan demikian, laba ditahan yang dilaporkan dalam neraca bukan merupakan kas dan “tidak tersedia” untuk pembayaran dividen atau yang lain.
3. Earnings Before Interest and Taxes to Total Assets Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktivitas perusahaan, sebelum pembayaran pajak dan bunga.
4. Market Value of Equity to Book Value of Debt Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dari nilai pasar modal sendiri (saham biasa). Nilai pasar modal sendiri diperoleh dengan mengalikan jumlah lembar saham biasa yang beredar dengan harga pasar per lembar

saham biasa. Nilai buku hutang diperoleh dengan menjumlahkan kewajiban lancar dengan kewajiban jangka panjang.

5. Sales to Total Asset Rasio ini menunjukkan apakah perusahaan menghasilkan volume bisnis yang cukup dibandingkan investasi dalam total aktivasnya. Rasio ini mencerminkan efisiensi manajemen dalam menggunakan keseluruhan aktiva perusahaan untuk menghasilkan penjualan dan mendapatkan laba. Dari teori yang dikemukakan diatas bahwa analisis diskriminan dapat bermanfaat bagi perusahaan untuk memperoleh peringatan awal kebangkrutan dan kelanjutan usahanya. Semakin awal suatu perusahaan memperoleh peringatan kebangkrutan, semakin baik bagi pihak manajemen karena pihak manajemen bisa melakukan perbaikan-perbaikan dan dapat memberikan gambaran dan harapan yang mantap terhadap nilai masa depan perusahaan tersebut. Agar perusahaan tetap berjalan dengan baik dapat melakukan analisis Z-Score untuk menilai bagaimana perusahaan mereka pada masa sekarang dan bagaimana perusahaan mereka nantinya. Analisis ZScore merupakan suatu persamaan yang dapat memprediksikan tingkat kebangkrutan atau tingkat kesehatan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

### **2.3 Manajemen Laba**

Praktek manajemen laba dapat ditinjau dari dua perspektif yang berbeda, yaitu perspektif etika bisnis dan teori akuntansi positif.

Dari kacamata etika, dapat dianalisis sebab-sebab manajer melakukan manajemen laba, sementara itu dari kacamata teori akuntansi positif dapat dianalisis dan diidentifikasi sebagai bentuk praktek manajemen laba yang dilakukan oleh manajer perusahaan. Esensi dari pendekatan moral atau etika adalah pencapai keseimbangan antara kepentingan individu (manajer) dengan kewajiban terhadap pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan kepentingan principal dan akhirnya menjadi insentif bagi manajer untuk melakukan manajemen laba.

Manajemen laba adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan menaikkan atau menurunkan laba yang dilaporkan dari unit yang menjadi tanggung jawabnya yang tidak mempunyai hubungan dengan kenaikan atau penurunan profitabilitas dalam jangka panjang.

Perbedaan pemahaman terhadap manajemen laba mendorong semakin berkembangnya model empiris yang digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas rekayasa manajerial ini. Secara umum ada 3 kelompok model empiris manajemen laba yang diklasifikasikan atas dasar basis pengukuran yang digunakan, yaitu (Sulistyanto, 2008) :

- a. Model berbasis akrual merupakan model yang menggunakan discretionary accruals sebagai proksi manajemen laba. Model manajemen laba ini dikembangkan oleh Healy (1985), De

Angelo (1986), Jones (1991), serta Dechow, Sloan dan Sweeney (1995).

- b. Model yang berbasis specific accruals, yaitu pendekatan yang menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item laporan keuangan tertentu dari industri tertentu pula. Model ini dikembangkan oleh Mc Nichols dan Wilson (1988) Petroni (1992), Beaver dan Engel (1996), Beneish (1997), serta Beaver dan Mc Nichols (1998).
- c. Model distribution of earnings dikembangkan oleh Burgatler dan Dichey (1997), DeGeorge, Patel, dan Zechauer (1999), serta Myers dan Skinner (1999).

Beberapa hal yang memotivasi seorang manajer untuk melakukan manajemen laba antara lain bonus scheme, debt covenant, political motivation, taxation motivation, pergantian CEO, dan initial public offering (Scott, 2000:352)

1. Alasan bonus (bonus scheme)

Adanya asimetri informasi mengenai keuangan perusahaan menyebabkan pihak manajemen dapat mengatur laba bersih untuk memaksimalkan bonus mereka.

2. Kontrak utang jangka panjang (debt covenant)

Semakin dekat perusahaan kepada kreditur, maka manajemen akan cenderung memilih prosedur yang dapat “memindahkan” laba periode mendatang ke periode berjalan. Hal ini bertujuan

untuk mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami kegagalan dalam pelunasan utang.

3. Motivasi politik (political motivation)

Perusahaan besar yang menguasai hajat hidup orang banyak akan cenderung menurunkan laba untuk mengurangi visibilitasnya, misalnya dengan menggunakan praktik atau prosedur akuntansi, khususnya selama periode dengan tingkat kemakmuran yang tinggi.

4. Motivasi pajak (taxation motivation)

Salah satu insentif yang dapat memicu manajer untuk melakukan rekayasa laba adalah untuk meminimalkan pajak atau total pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

5. Pergantian CEO (chief executive officer)

Banyak motivasi yang muncul saat terjadi pergantian CEO. Salah satunya adalah memaksimalkan laba untuk meningkatkan bonus pada saat CEO mendekati masa pensiun.

6. IPO (initial public offering)

Perusahaan yang baru pertama kali menawarkan harga pasar, sehingga terdapat masalah bagaimana menetapkan nilai saham yang ditawarkan. Oleh karena itu, informasi laba bersih dapat digunakan sebagai sinyal kepada calon investor tentang nilai perusahaan, sehingga manajemen perusahaan yang akan go public

cenderung melakukan manajemen laba untuk memperoleh harga lebih tinggi atas saham yang akan dijualnya.

Menurut Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) Nomor 1, bersama dengan informasi lainnya, laba berguna untuk menilai perubahan potensi sumber daya ekonomis yang mungkin dapat dikendalikan di masa depan, menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada, dan untuk perumusan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya (IAI 2004).

Manajemen laba adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laba. Laba yang memiliki tingkat manajemen laba yang abnormal adalah laba yang tidak berkualitas. Scott (2009) mendefinisikan manajemen laba adalah pilihan yang diambil manajemen, tindakan yang mempengaruhi laba yang dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan khusus dari pelaporan laba.

Schipper (1989) mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu intervensi yang memiliki tujuan tertentu dalam proses pelaporan keuangan eksternal demi mendapatkan keuntungan pribadi baik bagi manajer maupun pemegang saham.

$$\text{Manajemen Laba} = \frac{\text{Akrual Modal Kerja}}{\text{Penjualan}}$$

$$\text{Akrual Modal Kerja} = \Delta \text{AL} - \Delta \text{HL} - \Delta \text{Kas}$$

Ket:

$\Delta$ AL: Perubahan aktiva lancar periode

$\Delta$ HL: Perubahan hutang lancar periode

$\Delta$ Kas: Perubahan kas dan ekuivalen kas periode



## 2.4 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependent

### 2.4.1. Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Terhadap Manajemen Laba

Mekanisme Tata Kelola dapat mengurangi risiko terjadinya manajemen laba dan peningkatan kinerja perusahaan dengan mendasar pada peraturan-peraturan yang berlaku. Manajemen laba bukanlah suatu hal yang merugikan selama dilakukan dalam koridor-koridor peluang, manajemen laba tidak selalu diartikan dengan proses manipulasi laporan keuangan karena terdapatnya beberapa pilihan metode yang dapat digunakan dan bukan sebagai suatu larangan. Salah satu cara yang digunakan untuk memonitor suatu perusahaan masalah kontrak dan untuk membatasi perilaku oportunistik manajemen adalah mekanisme tata kelola perusahaan (corporate governance mechanism).

Penerapan prinsip corporate governance dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada sebuah perusahaan. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu banyak yang menghubungkan corporate governance dengan kinerja keuangan, penelitian yang dilakukan oleh Cornett et al (2005) terhadap perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam S&P 100, menunjukkan dimana perusahaan-perusahaan yang melaksanakan good corporate governance mengalami peningkatan kinerja perusahaan yang signifikan. Penerapan mekanisme tata kelola ini dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan.

#### 2.4.2. Pengaruh Prediksi Kebangkrutan Terhadap Manajemen Laba

Kondisi keuangan perusahaan yang buruk dan diprediksi mengalami kebangkrutan akan membuat manajemen berbuat semampunya untuk menutupi kondisi tersebut (Lo, 2005). Apabila kinerja dan prospek perusahaan buruk, manajemen memberikan sinyal dengan mencatat akrual diskresioner negatif untuk menunjukkan bahwa laba periode kini serta yang akan datang lebih buruk daripada laba non-diskresioner periode kini. Hal ini menjelaskan bahwa manajer melakukan manajemen laba untuk memberikan sinyal kabar buruk dengan tujuan memberikan informasi kepada pasar bahwa manajer mempunyai keyakinan dapat mengatasi masalah yang dihadapi dan manajer juga berharap untuk memperoleh apresiasi pasar untuk menahan penurunan harga saham perusahaan (Lo, 2005).

DeAngelo et al. (1994), dalam penelitiannya pada perusahaan terdaftar di NYSE, menemukan bahwa para manajer perusahaan yang mengalami kerugian dan pengurangan dividen secara persisten cenderung melakukan *income-decreasing* untuk mendapatkan kontrak yang lebih baik selama *renegoisasi* hutang. Sebaliknya, Sweeney (1994) menemukan bahwa perusahaan dalam keadaan *distressed* akan melakukan pilihan memanipulasi laba untuk menghindari pelanggaran perjanjian hutang. Sedangkan penelitian lain menemukan bahwa perusahaan dengan masalah perjanjian hutang akan menggunakan akrual diskresioner manajemen yang lebih tinggi akibat adanya kesulitan

keuangan (DeFond and Jiambalvo, 1994; Dichev and Skinner, 2002 ;  
Beneish et al., 2002 ).

